



Gerakan Sosial Kelompok Perempuan Dalam Melindungi Kawasan Ekosistem Leuser

Dila Iqlima^{1,3}, Faradilla Fadlia², Ismar Ramadani³

^{1,2} Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Indonesia

³Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al Muslim, Indonesia

E-mail: Faradilla_fadlia@usk.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 21-03-2025

Diterima: 25-04-2025

Diterbitkan: 30-04-2025

Keywords:

Social Movement, Woman, Ecosystem, Lauser

Kata Kunci:

Gerakan Sosial, Perempuan, Ekosistem, Lauser



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

A social movement formed by a women's group in Damaran Baru village, Bener Meriah Regency, which aims to protect forests, based on the flood disaster due to forest encroachment by residents of neighboring villages. The aim of this research is to find out the efforts made by women's groups to protect forests and their impacts. This study used descriptive qualitative method. The research results show that the efforts made by women's groups by approaching and patrolling the forest are very effective, apart from that the use of non-timber forests also provides benefits by not destroying nature. Improved environmental condition after various activities carried out by women's groups, the paradigm of society which was previously indifferent to the environment is becoming more concerned. It can be concluded that the women's social movement that was formed in Damaran Baru Village is clear evidence that women are instinctively related to nature which grows women's initiative in protecting the environment when damage occurs.

Abstrak

Gerakan sosial yang dibentuk oleh kelompok perempuan di desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah yang bertujuan untuk menjaga hutan, didasari oleh terjadinya bencana banjir akibat perambahan hutan yang dilakukan oleh warga desa tetangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan kelompok perempuan untuk melindungi hutan dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kelompok perempuan dengan melakukan pendekatan dan patroli hutan sangat efektif, selain itu pemanfaatan hutan non kayu juga memberi keuntungan dengan tidak merusak alam. Lingkungan semakin baik setelah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan, paradigma masyarakat yang tadinya acuh tidak acuh terhadap lingkungan menjadi semakin peduli, Dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial perempuan yang terbentuk di Desa Damaran baru merupakan bukti yang nyata bahwa perempuan secara naluri berkaitan dengan alam yang menumbuhkan inisiatif perempuan dalam menjaga lingkungan bila terjadi kerusakan.

Pendahuluan

Studi mengenai Gerakan sosial perempuan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti diantaranya, Dia Puspitasari, dalam skripsi yang berjudul “Gerakan Perempuan Melawan Korporasi Tambang” di Pegunungan Kendeng Utara, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan yang mereka miliki atas alam yang dieksploitasi, selain itu mengetahui bagaimana strategi gerakan yang dilakukan oleh perempuan rembang dalam melawan korporasi tambang. Hasil penelitian merekonstruksi pengetahuan mengenai alam, ibu-ibu Rembang memaknai bahwa bumi merupakan representasi dirinya. Pertama, subjek dalam memberikan interpretasi sangat dipengaruhi faktor historis oleh nilai-nilai *sedulur sikep* dan ajaran para sesepuh yang kemudian diinternalisasi dalam gerakan ibu-ibu Rembang, sehingga terlihat lebih mendukung proses terbentuknya pengetahuan bahwa bumi sebagai ibu. Oleh sebab itu, bumi dan perempuan memiliki persamaan yakni sama-sama harus dijaga. Kedua, menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup generasi penerus agar tidak kesulitan dalam mendapatkan sumber kehidupan.

Gerakan Sosial atau *Social Movement* adalah aktivitas sosial berupa gerakan atau tindakan sekelompok orang yang bersifat informal atau organisasi. Suatu Gerakan sosial biasa berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Aktivitas gerakan sosial sendiri dapat dianalisis dengan menggunakan framing, menyebut bahwa framing merupakan kerangka penafsiran yang memungkinkan orang untuk menempatkan, memahami, mengidentifikasi dan menamai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sekitar mereka di seluruh dunia secara keseluruhan. Frame berperan membantu orang untuk menyederhanakan peristiwa menjadi pengalaman yang bermakna lalu melakukan organisasi atas pengalaman tersebut untuk selanjutnya menemukan panduan dalam bertindak merespon peristiwa yang terjadi.

Merujuk pada gagasan Goffman, Benford dan Snow. menawarkan konsep framing melalui tiga peran. Pertama, Diagnostic Framing berperan mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah tersebut terjadi. Pada bagian ini masalah diterjemahkan dengan lebih sederhana dengan tujuan untuk lebih mudah menemukan solusi yaitu dengan menentukan siapa yang menjadi korban dari suatu masalah, siapa yang menjadi pelaku, mengidentifikasi masalah atau menunjuk siapa atau apa yang harus dipersalahkan. Kedua, prognosis frame menawarkan kemungkinan solusi atas masalah yang sudah diidentifikasi, rencana-rencana aksi dan strategi untuk melaksanakan solusi tersebut. Ketiga, motivational framing yang menyediakan alasan untuk terlibat dalam gerakan bersama untuk

memperbaiki situasi termasuk dalam menciptakan *tagline*, jargon, atau simbol- simbol gerakan.

Sebelum Perang Dunia Kedua, gerakan sosial masih bersifat *massive*, timbul sebagai bentuk penolakan maupun perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Pasca Perang Dunia Kedua, studi gerakan sosial masuk ke dalam periode reformasi dan perubahan yang disebut *Post-War Periode*, pada saat itu gerakan sosial muncul dengan jumlah banyak dipicu oleh kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan menuntut hak. Bahkan "Demokrasi" merupakan hasil dari gerakan sosial nyata dari keberhasilan gerakan sosial. Dimana ia berasal dari keresahan di berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pada Abad 21 saat teknologi dan globalisasi merubah drastik pola pikir, budaya, transaksi dan gaya hidup masyarakat, Gerakan Sosial juga mengalami evolusi, Gerakan sosial kini menjadi lebih spesifik mengangkat kasus tertentu dan mulai meninggalkan organisasi formal sebagai kendaraan aspirasinya

Gerakan sosial di Desa Damaran Baru merupakan salah satu gerakan sosial baru yang mengangkat isu lingkungan sebagai fokus gerakan. Dimana kerusakan lingkungan yang terjadi akibat alih fungsi hutan lindung menjadi kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat dari desa tetangga Damaran Baru (nama desa tidak disebutkan karena tidak ada izin dari pihak Hutan Alam Lingkungan Aceh/HAkA maupun gerakan perempuan Damaran Baru). Karena desa ini berada dekat dengan hutan lindung, maka pada saat banjir bandang terjadi, desa Damaran Baru mengalami kerusakan yang paling parah, seperti rusaknya rumah warga dan infrastruktur. Selain itu banjir juga menyebabkan warga terhambat dalam melakukan pekerjaan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari hari.

Hal tersebut membuat kelompok masyarakat yang 70% adalah kaum perempuan melalui pendampingan lembaga yayasan HAkA (Hutan Alam Lingkungan Aceh) mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan lindung di Bener Meriah melalui skema perhutanan sosial, masyarakat diberikan akses untuk mengelola hutannya sendiri. Skema tersebut terdiri dari 5 skema. Yaitu, hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan desa, dan Kemitraan Kehutanan. Untuk di kawasan Bener Meriah mereka menggunakan skema hutan desa, karena masyarakat desa menuntut agar mereka keterlibatan untuk melindungi hutan. Dengan skema perhutanan sosial hutan desa ini maka hak pengelolaan hutan lindung di desa Damaran Baru diberikan kepada masyarakat selama 35 tahun, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas pelarangan, pencegahan bahkan melakukan penindakan bagi yang melanggar aturan. Selain melindungi hutan lindung, gerakan sosial Damaran Baru juga melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat selama 6 bulan terakhir. Kegiatan

ekonomi yang dilakukan tidak merusak keanekaragaman hayati, yaitu dengan cara memanfaatkan kawasan hutan tapi dengan hasil hutan non kayu. Penelitian berusaha untuk menganalisa gerakan sosial perempuan di Damaran Baru dengan fokus gerakan melindungi kawasan hutan lindung dengan menggunakan konsep framing.

Metode

Lokasi penelitian ini di Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana masalah yang diselidiki akan dipecah dengan menggambarkan, memaparkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak tanpa mengurangi sebagaimana adanya. Informan yang digunakan oleh penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang yang meliputi 3 orang dari LSM, 1 orang ketua kelompok perempuan, 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 3 orang akademisi. Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Berupa Wawancara, Dan Dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Letak Strategis desa Damaran Baru, perambahan kawasan hutan lindung dan dampaknya bagi masyarakat.

Desa Damaran Baru, Kec Timang Gajah, Kab Bener Meriah merupakan desa yang terletak dikaki gunung Burni Telong yang menempatkan sebagian besar hutan di beberapa desa merupakan kawasan hutan lindung. Hasil observasi memperlihatkan bahwa kawasan hutan lindung baru memiliki kontur tanah yang berpasir sehingga mudah mengalami longsor. Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah pada Bulan September 2015 di Aceh Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kecamatan Timang Gajah dan Wih Pesam, terletak pada zona dengan potensi terjadi gerakan tanah menengah-tinggi dimana pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Pada zona ini gerakan tanah lama juga dapat aktif kembali. Desa Damaran Baru juga terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membuat potensi gerak tanah dapat terjadi. Terdapat dua sungai besar di antara desa ini yaitu sungai Wih Gile dan sungai Damaran Baru hal ini menyebabkan potensi bencana yang cukup besar seperti banjir bandang.

Sebagai daerah yang rawan bencana desa Damaran Baru pernah mengalami banjir bandang pada 13 September 2015. Banjir ini menyebabkan ruas jalan Takengon-Bireuen lumpuh total karena badan jalan sepanjang 2 km mengalami kerusakan. Selain itu kebun kopi milik warga juga rusak seluas 5 Ha, 25 rumah warga rusak, dan sekitar 462 jiwa mengungsi di 4 titik. Mereka tersebar di 2 tempat

di Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, yaitu SD Karang Jadi yang ditempati oleh 262 jiwa dan di rumah ibadah yang diisi 92 pengungsi. Sedangkan 2 titik lainnya di Koramil Wih Pesam. Di tempat ini ada 69 jiwa dan di rumah Sekretaris Desa Pante Raya Barat ada 39 orang. Hal tersebut disebabkan karena adanya perambahan hutan lindung oleh masyarakat desa tetangga menjadi kebun kopi, pada saat curah hujan tinggi, fungsi hutan yang seharusnya menyerap air, tidak berfungsi secara maksimal, sehingga hujan menyebabkan volume air sungai meluap dan menyebabkan banjir pada desa sekitarnya. perambahan ini pun sudah dilakukan sekitar setengah tahun lamanya karena pada saat itu tanaman kopi tersebut baru tumbuh.

Tutupan hutan di Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, berkurang setiap tahunnya. Data GIS Yayasan HAKA pada 2017 menunjukkan, luas tutupan hutan yang hilang mencapai 569 hektar. Tahun 2018, meningkat menjadi 765 hektar dan 2019 mencapai 951 hektar. Hal tersebut karena terjadinya kegiatan pengerusakan di dalam hutan, termasuk hutan lindung yang disebabkan oleh khususnya perambahan yang dilakukan masyarakat sekitar.

2. Inisiatif HAKA dan Masyarakat terkait Peralihan Status Hutan Negara Menjadi Hutan Sosial, Lembaga Pengelolaan Hutan Hutan Sosial, LPHK, Pemetaan Kebun, Pemanfaat Hasil Hutan Non Kayu dan Ekowisata Pada bagian ini akan membahas bagaimana solusi terhadap kerusakan

hutan lindung diformulasikan oleh gerakan perempuan Desa Damaran Baru berupa: Inisiatif Hutan Sosial, kehadiran LPHK, upaya pemetaan kebun kemudian pemanfaatan hasil non kayu dan ekowisata. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi persoalan kerusakan hutan dan potensi bencana banjir bandang di desa Damaran Baru. Hutan sosial di Desa Damaran Baru merupakan inisiatif kelompok perempuan di desa ini didampingi oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan terkait hutan lindung, dimana yang ada hanya himbauan bagi masyarakat untuk tidak masuk hutan. sementara penebangan pohon dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan terus terjadi. Atas kondisi itu masyarakat Damaran Baru yang terkena dampak banjir bandang akibat dari kerusakan hutan ingin menjaga hutan dengan melarang orang untuk melakukan aktivitas penebangan pohon atau alih fungsi hutan menjadi perkebunan, namun mereka tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Sehingga HAKA mencoba membantu masyarakat agar dapat terlibat dalam aktivitas menjaga lingkungan hutan melalui perhutanan wilayah kelola rakyat dalam skema perhutanan sosial. Dimana masyarakat mendapat jaminan untuk mengelola kawasan hutan melalui pendekatan perhutanan sosial.

Perhutanan sosial merupakan sebuah program nasional yang mengubah sistem manajemen hutan dari *state forest management* yaitu pengelolaan hutan oleh negara, tetapi sekarang lebih ke *community based forest management* dengan

tujuan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Hal ini menjadi alat legal bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Pendekatan ini dianggap lebih baik karena jika masyarakat sendiri yang mengelola hutan maka akan lebih efektif karena masyarakat sekitar hutan yang mengerti apa saja kebutuhan untuk mengelola hutan dan itu terjadi jika pihak pemerintah yang mengelola hutan. Dimana tidak semua aspek bisa terpenuhi, dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial sampai tahun 2017 sejumlah 239.341 Kepala Keluarga (KK), telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan Nusantara. Hal ini tersampaikan dalam wawancara langsung dengan Ketua Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan, Bapak Dedek Hadi, S. Hut.T, M.Si mengatakan;

“Adanya perubahan paradigma di kehutanan, yang tadinya *state forest management* yaitu pengelolaan hutan oleh negara, tetapi sekarang lebih ke *community based forest management* yaitu masyarakat yang terlibat aktif dalam pengelolaan, karna pembangunan di sektor perhutanan yang dilakukan pemerintah tidak memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat sehingga pemerintah membuat masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan hutan.”

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya melalui 5(lima) skema diantaranya, *pertama* Hutan Desa (HD), adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, izin diberikan kepada lembaga desa seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan, lembaga desa yang dibentuk bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Selanjutnya, untuk mengontrol aktivitas yang berada di kawasan hutan lindung dan mengembalikan fungsi hutan seperti semula, HAKA beserta gerakan perempuan di desa tersebut membentuk tim patroli hutan “*Mpu Uteun*” (Baca: yang memiliki hutan atau pemilik hutan) yang merupakan tim penjaga hutan perempuan pertama yang ada di Aceh. Adanya rasa ingin merubah keadaan membuat perempuan di desa damaran baru melakukan aksi kolektif, karena menurut mereka hutan adalah sumber kehidupan, perempuan 5 kali lebih banyak membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya sehingga bila lingkungan rusak, maka perempuan yang pertama kali merasakan kerugiannya.

3. Pemetaan Kebun

Setelah mengalami dampak dari kerusakan hutan, kelompok perempuan di Damaran Baru mulai melakukan langkah langkah kecil untuk merubah keadaan lingkungan mereka, HAKA yang banyak membantu dalam proses pembentukan gerakan sosial perempuan ini juga ikut memonitoring gerakan tersebut. Langkah pertama yang mereka ambil adalah memberikan pemahaman kepada para perambah yang berasal dari desa tetangga, seperti yang disampaikan oleh Crisna Akbar dalam wawancaranya.

“Ada masyarakat yang sudah melakukan perambahan di kawasan hutan lindung sudah menanam kopi di sana, lalu kami melakukan pendekatan sosial dengan memberitahu bahwa yang sudah anda tanami sudahlah, tapi kalau bisa tidak menambah areal luasnya. Ini merupakan bentuk membangun kesadaran yang kami lakukan kepada masyarakat yang sudah melakukan pelanggaran.” (Crisna Akbar, project leader HAKA, Wawancara 27 Maret 2019).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kebun kopi yang sebelumnya telah ditanam oleh warga desa tetangga di wilayah hutan lindung tidak dihilangkan, dengan syarat tidak menambah luas areal kebun, karena bagaimanapun kebun tersebut sudah menjadi sumber penghasilan bagi mereka. Selain itu, agar luas areal kebun tidak bertambah kelompok perempuan melakukan pemetaan jumlah pemilik kebun dan luas lahan, selain itu menandatangani kesepakatan antara kelompok perempuan dan pemilik kebun seperti yang disampaikan oleh Ketua kelompok LPHK berikut ini.

“Kami melakukan pemetaan kebun di wilayah hutan lindung, kebun siapa- siapa saja yang sudah ada kemudian akan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama dimana masyarakat tidak boleh menambah luas areal kebun di kawasan hutan.” (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Setelah melakukan pemetaan areal kebun, kelompok perempuan juga melakukan upaya dengan mengajak perambah mengikuti kegiatan kelompok di area hutan lindung seperti menanam pohon agar merasakan manfaat dari menjaga hutan secara langsung.

4. Patroli Hutan

Setelah berhasil menjadikan hutan lindung sebagai hutan sosial dan melakukan pemetaan. Gerakan perempuan Damaran Baru dan HAKA melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga di kawasan hutan lindung. Patroli hutan dilakukan oleh ranger perempuan Damaran Baru dan ini merupakan patroli hutan pertama di Aceh yang dilakukan oleh perempuan dan merupakan yang kedua setelah Bengkulu, seperti yang disampaikan ibu Sumini, ketua kelompok LPHK,

“Masyarakat desa Damaran Baru berprinsip untuk menghijaukan hutan yang rusak dengan cara menanam kembali, kaum perempuan desa Damaran

Baru juga membentuk ranger perempuan yang bertugas berpatroli dalam hutan, tujuannya menjaga hutan dari kegiatan yang merusak, kegiatan ini kami beri nama Mpu Uteun. Kami melakukan patroli di hutan selama 10 hari bila cuacanya sedang bagus, tapi apabila sedang tidak bagus kami hanya melakukan patroli selama 5 hari dalam sebulan.” (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Terkait kegiatan dan keanggotaan tim patroli hutan berikut pernyataan pihak HAKA,

“Kami bersama ibu-ibu disana membentuk tim patroli hutan, sampai saat ini sudah masuk bulan ke 5, dalam sebulan mereka melakukan patroli selama 10 hari dalam minggu pertama, ranger perempuan ini adalah yang pertama di Aceh, ranger perempuannya adalah kelompok ibu-ibu di sana, mereka melakukan pemulihan kawasan, dulu ada hutan-hutan yang sudah digunduli orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka coba menanam kembali, membuat penghijauan kembali dengan tanaman-tanaman ekonomis contohnya alpukat, dan lainnya, jadi status dan fungsi kawasannya tetap seperti semula yaitu sebagai kawasan penyangga.” (Crisna Akbar, Wawancara 10 Juli 2020).

Dibentuknya tim patroli perempuan atau Mpu Uteun adalah bentuk nyata dari adanya pengelolaan kawasan hutan lindung. Patroli hutan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya perempuan untuk mengontrol kegiatan kawasan hutan, dengan mengamati setiap pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, selain itu kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan tim patroli yang bertujuan mengembalikan fungsi hutan yaitu sebagai kawasan penyangga kehidupan (mencegah banjir, mengatur tata air dan lainnya). Selain itu, dalam kegiatan patroli tim perempuan menyertakan laki-laki sebagai barisan terdepan, bila melakukan patroli lebih jauh di dalam hutan. Kerjasama ini dapat mengubah paradigma masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan bagi setiap orang yang berada di daerah tersebut. Bukan hanya gerakan perempuan saja yang menjaga namun peran laki-laki juga mempengaruhi jalannya perlindungan hutan.

5. Hasil Hutan Non Kayu

Selain melakukan pemetaan kebun dan patroli hutan, gerakan perempuan Damaran Baru juga terlibat dalam meningkatkan perekonomian desa melalui hasil hutan non kayu. Kelompok ini melakukan hal-hal yang bersifat ekonomis tetapi dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu, sehingga tidak merusak lingkungan. Seperti pernyataan dari ketua LPHK berikut.

“Untuk ekonomi di desa ini kami memanfaatkan hasil hutan non kayu, kalau di kampung kami ini kan banyak jenis sayur mayur dan buah, kami membuat pembibitan seperti biji alpukat, aren, jambu biji itu kami buat secara

swadaya dan sudah berjalan. Kami menanam tanaman tersebut di areal pemanfaatan lainnya, hasilnya kan lumayan kalo kita jual, selain itu juga kami membuat kerajinan tangan dari olahan limbah kayu berupa bingkai foto dan gantungan kunci, budidaya lebah madu, bahkan untuk lebah madunya pun sudah mulai panen walaupun jumlahnya masih sedikit, untuk pembenahan wajah desa kami sudah menanam bunga di sepanjang jalan masuk desa, selain itu kami juga mulai menganyam tikar dan lembaga ini terus bergerak pelan pelan". (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Besarnya kontribusi pemanfaatan non kayu tersebut menunjukkan bahwa masih besarnya tingkat pemanfaatan yang tersedia. Masyarakat memahami bahwa dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara terus-menerus dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya yang dimanfaatkan. Untuk itu, perlu dilakukannya pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari dengan mengikuti kaidah atau peraturan-peraturan yang berlaku dan mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan.

6. Ekowisata

Selain hasil hutan non kayu, masyarakat juga memanfaatkan keindahan desa Damaran Baru dengan kawasan hutan sebagai ekowisata. Berikut pernyataan Sumini ketua LHPK.

"Salah satunya ketika bicara tentang memanfaatkan hutan non kayunya yang memang pas adalah tempat wisata, untuk wisata alam kan ada hamparan anggrek kantong semar, enggak semua hutan ada jenis itu, mungkin itu bisa menjadi salah satu untuk menarik wisatawan untuk sanggar seninya pun kami sudah menggerakkan didong anak-anak yang dulu pernah dilakukan masyarakat kampung, selain itu juga ada sumber mata air panas di dalam hutan dan air terjun, kami mau jadikan itu sebagai wisata alam juga tetapi karena kondisi jalan belum mendukung, kita juga belum punya izin untuk melakukan aktivitas di dalam hutan untuk wisata jadi untuk wisatanya kami lakukan di luar kawasan hutan lindung". (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Selain pemetaan hutan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, gerakan perempuan di Damaran Baru juga mencoba memanfaatkan membuka ekowisata. Dimana gerakan perempuan ini membuka paket ekowisata kawasan hutan lindung secara berkala. Berikut contoh paket ekowisata yang ditawarkan.



Gambar 1. Flyer promosi untuk Pariwisata di Damaran Baru

Flyer diatas merupakan bentuk inisiatif gerakan perempuan Damaran Baru dalam memberikan nilai tambah hutan lindung melalui paket ekowisata. Dapat dilihat rangkaian kegiatan yang ditawarkan merupakan spot perjalanan yang menjadikan keindahan alam kawasan hutan sebagai daya tarik. Diantaranya; Perkebunan kopi, aliran sungai, air panas, padang savana, Taman anggrek, Puncak Panorama dan pemandangan matahari terbenam. Penjelasan diatas merupakan gambaran bagaimana gerakan perempuan di Desa Damaran Baru dalam menemukan solusi bagi persoalan kerusakan lingkungan di kawasan hutan lindung. Diantaranya, pemetaan hutan, menjadikan kawasan hutan lindung sebagai hutan sosial, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan ekowisata.

7. Motivasi dan Keberhasilan Melindungi Hutan.

Pada bagian ini akan membahas dua hal. Pertama, konsep *Mpu Niuten* dan motivasi keterlibatan perempuan dalam gerakan sosial untuk melindungi kawasan hutan lindung. Kedua, keberhasilan yang sudah dicapai. *Mpu niuten* merupakan konsep rasa kepemilikan terhadap hutan dari kelompok perempuan di desa Damaran Baru. Kata *Mpu Niuten* merupakan bahasa Gayo yang berarti yang memiliki hutan. Konsep ini digunakan untuk menarik keterlibatan perempuan.

Selain karena konsep di atas, keterlibatan perempuan dalam gerakan ini juga dipengaruhi oleh kesadaran bahwa hutan merupakan sumber kehidupan mereka. Dimana perempuan memerlukan air tiga sampai lima kali lebih banyak daripada laki-laki. Oleh karena itu, bila lingkungan rusak maka perempuan yang pertama kali merasakan dampak tersebut. Kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kebutuhan sendiri tanpa memikirkan dampak terhadap orang lain menyebabkan bencana yang besar sehingga merugikan masyarakat luas. Hal ini turut meningkatkan kepedulian warga desa untuk memelihara hutan terutama bagi kaum perempuan di desa Damaran Baru. Berikut pernyataan, Sumini:

“Bagaimanapun hutan itu sumber kehidupan kita, salah satunya air, karena kita perempuan banyak sekali membutuhkan air, sebagai contoh saat menstruasi, melahirkan, kita memakai 3 sampai 5 kali lipat kebutuhan dari laki laki.” (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Kemudian gerakan sosial perempuan ini dibuat lebih terstruktur dengan membentuk lembaga LPHK melalui Qanun Gampong Damaran Baru nomor 5 tahun 2019 lembaga ini terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan berbagai bidang seperti pendidikan, pengawasan, promosi dan kampanye. Anggota yang terdaftar di lembaga ini sebanyak 46 terdiri dari 23 orang ibu-ibu dan 23 orang bapak-bapak bersama anak muda beserta aparatur gampong. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh gerakan perempuan yang ada di Desa Damaran Baru.

8. Keberhasilan-keberhasilan

Selain konsep Mpu Niuten dan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Keberhasilan gerakan ini juga turut menjadi mempengaruhi gerakan terus berlangsung. Ini menjadi mesin penggerak bagi sebuah gerakan sosial. Berkat keuletan dan kerja keras dari kelompok perempuan yang ada di Desa Damaran Baru membuat kemajuan yang dirasakan baik dari segi lingkungannya maupun ekonomi desa mereka seperti yang disampaikan ibu sumini ketua LPHK Desa Damaran Baru,

“Pada saat kami patroli ke hutan kami tidak menemukan adanya perambahan lain, untuk kebun yang sudah ditanami ya sudah lah karena kalo mengusir mereka kan gak mungkin, mereka cari makan juga disitu, para perambahnya juga kami ajak untuk melakukan kegiatan kelompok bersama, seperti menanam pohon pokat bersama.” (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Hal ini juga ditegaskan oleh Pimpinan proyek program Selamatkan Hutan dan

Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK), Crisna Akbar mengatakan : “Selama pendampingan yang dilakukan oleh kelompok, justru tidak ada lagi kegiatan pengrusakan lingkungan hari ini, justru sudah membaik, karena kelompok melakukan kegiatan pemulihan kembali lingkungan-lingkungan yang sudah rusak, kita sudah bisa pastikan 90% desa sudah terjaga, para ranger mendapatkan dukungan untuk melakukan patroli 10 hari dalam sebulan, jadi selama 10 hari rutin mereka ke hutan, perambahan sudah berhenti, bahkan pembukaan kebun sudah tidak ada lagi. (Crisna Akbar, Wawancara 10 Juli 2020).

Dari bidang Ekonomi pun, masyarakat sudah memetik hasil dengan menjual buah dan tanaman yang di tanam, sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Berikut pernyataan, Sumini.

“Ekonomi, yang jelas hingga saat ini ada beberapa masyarakat yang terbantu ekonominya, karena adanya kegiatan mulai dari kegiatan pemanfaatan lebah madu, kelompok sudah bertambah ekonominya dengan adanya penjualan-penjualan hasil madu, dan kegiatan lainnya. (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Sementara itu untuk ekonomi alternatif berhasil dilakukan dengan merubah desa menjadi desa wisata, buktinya wisatawan mancanegara datang untuk mengunjungi desa Damaran Baru. Berikut pernyataan, Sumini:

“Selain itu juga dengan adanya wisata alam, pendapatan ekonomi kami juga meningkat, kami membuat homestay di rumah warga, jadi tamu yang datang nginepnya di kampung Damaran Baru kulinernya pun kuliner kita Gayo, sudah ada beberapa wisatawan asing yang datang seperti dari Inggris 2 orang, dari Jerman 1 orang dan dari Jepang 1 orang, wisatawan yang datang pun kami kasih bibit mereka juga ikut menanam bersama ibu ibu lain. (Sumini, Wawancara 13 Juli 2020).

Selain itu, dengan wajah desa yang lebih hijau dan asri, desa Damaran Baru mendapat nominasi dari Anugerah Pesona Indonesia (API), yang merupakan ajang tahunan apresiasi wisata terpopuler di Indonesia. Berikut pernyataan, Sumini, (“Damaran baru juga sudah masuk satu kategori di nominasi API nanti di bulan delapan sudah mulai voting”). Penjelasan di atas memberikan gambaran bagaimana motivasi memberikan kontribusi bagi keberhasilan dan keberlanjutan gerakan sosial. Bahwa konsep *Mpu Niuten*, kesadaran tentang pentingnya fungsi hutan bagi kelompok perempuan, serta keberhasilan-keberhasilan yang sudah disarankan menjadi sumber kekuatan dari gerakan perempuan di Damaran Baru ini.

Kesimpulan

Adanya inisiatif dari Masyarakat untuk mengelola hutan mereka setelah desa mereka hancur akibat bencana banjir, Upaya Upaya yang dilakukan Masyarakat seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat, memanfaatkan hutan non kayu, alternatif lain seperti pariwisata, dan patrol hutan mengubah pandangan Masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan bagi setiap orang, bukan hanya Perempuan tapi juga laki laki.

Daftar Rujukan

- Asadi, F. (2018). Strategi Framing HTI, FPI, Dalam Aksi Damai 411: Perspektif Gerakan Sosial.
- Asnelly, A., & Yusran. (2017). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisi Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktivitas Illegal Fishing. *Indonesian Journal of International Relation*.

- Dimpos, M. (2007). *Gerakan Sosial dan Perubahan Publik*
- Haryanto, S. (2016). In *Spektrum Teori Sosial: dari klasik hingga post modern* (p. 114). Jogjakarta: AR-RUZZ Media
- Khaeroni, C. (2009). Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva dan Implikasinya pada pengembangan paradigma pendidikan agama islam inklusif gender.
- Rahmah, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir (Studi Kasus Sungai Wih Gile di Kampung Damaran Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)
- Rusmanto, J. (2013). *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama.
- Silalahi, D. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (p. 284). Bandung: PT. Refika Aditama
- Suka, G. (2010). *Teori Etika Lingkungan*.
- Suryaman, W. E. (2017). *Ekofeminisme : Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*. Yogyakarta: Cantik Pustaka.
- Weber, C. (2001). *International Relation Theory*. New York: Routledge.